

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kediri berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 (studi kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)” ini ditulis oleh Alinda Oris Wahyu Maunti, NIM. 126403203176, pembimbing Ruly Priantilianingtiasari, S.E., S.Pd., M.Sy.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pelaporan Keuangan, BPKAD, Permedagri No. 77 Tahun 2020

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terutama di Kabupaten Kediri merupakan langkah penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan serta pelaporan keuangan publik. BPKAD memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dan aset daerah di seluruh SKPD. Dengan begitu, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan penyusunan keuangan di BPKAD menjadi contoh bagi SKPD lain termasuk di Kabupaten Kediri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kediri, dengan fokus pada BPKAD Kabupaten Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dekriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan melaksanakan wawancara secara langsung dengan pihak BPKAD dan data sekunder yaitu laporan keuangan konsolidasi tahunan BPKAD Kabupaten Kediri. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Kediri telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual yang sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang menekankan transparansi dan akuntabilitas. Sistem akuntansi yang digunakan juga telah sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 yaitu menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam penyusunan dan pelaporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan telah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) opini BPK-RI selama 8 kali, dengan artian bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) selama 8 kali.

ABSTRACT

The thesis titled “Implementation of Regional Financial Accounting Systems and Financial Reporting in Regional Work Units of Kediri Regency Based on Permendagri No. 77 of 2020 (Case Study of the Regional Financial and Asset Management Agency)” is written by Alinda Oris Wahyu Maunti, NIM. 126403203176, supervised by Ruly Priantilianingtiasari, S.E., S.Pd., M.Sy.

Keywords: Regional Financial Accounting System, Financial Reporting, BPKAD, Permendagri No. 77 of 2020

The implementation of the regional financial accounting system, especially in Kediri Regency, is an important step in realizing transparency and accountability in the management and reporting of public finances. The Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) plays a crucial role in coordinating the management of regional finances and assets across all Regional Work Units (SKPD). Thus, the implementation of the Regional Financial Accounting System (SAKD) and financial preparation in BPKAD serves as an example for other SKPDs, including those in Kediri Regency.

This study aims to analyze the implementation of the regional financial accounting system and financial reporting in Regional Work Units (SKPD) in Kediri Regency, focusing on the BPKAD of Kediri Regency. The research method used is descriptive qualitative research. The data sources include primary data obtained through direct interviews with BPKAD officials and secondary data, namely the annual consolidated financial reports of BPKAD Kediri Regency. Data collection techniques employed include field studies, interviews, and documentation.

The results of this study indicate that BPKAD Kediri Regency has implemented an accrual-based accounting policy in accordance with Permendagri No. 77 of 2020, which emphasizes transparency and accountability. The accounting system used is also in line with Permendagri No. 77 of 2020, utilizing the Local Government Information System (SIPD) for financial preparation and reporting. The quality of the financial reports produced has received an Unqualified Opinion (WTP) from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI) for 8 consecutive times, indicating that the local government financial reports have obtained an Unqualified Opinion (WTP) from the BPK-RI.